



**LAPORAN KOMISI VI DPR RI
ATAS HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
TERHADAP RUU TENTANG PENGESAHAN *COMPREHENSIF
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT between the REPUBLIC
of INDONESIA and the EFTA STATES*
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA EFTA)**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 9 APRIL 2021**

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Perdagangan;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM;
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan;
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua
Syaloom
Om Swastiastu
Namo Buddhayo
Salam Kebajikan***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mendengarkan Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Perkenalkan saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I Komisi VI DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA) dalam Rapat Paripurna hari ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 27 Juni 2019, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Mendag) tanggal 18 November 2019 dalam rangka Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA) dan memutuskan bentuk produk hukum pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang dan akan dibahas pada Masa Persidangan berikutnya.

Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2019, Komisi VI DPR RI telah menyampaikan surat No. LG/19327/DPR RI/XI/2019 kepada Pimpinan DPR RI mengenai Penyampaian Laporan hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah, salah satunya dalam rangka Persetujuan RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA).

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi, pada tanggal 13 Desember 2019, Ketua DPR RI telah mengirimkan Surat Kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan RUU dan Naskah Akademik tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA.

Pada tanggal 27 Januari 2020, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan pakar/akademisi dari beberapa Universitas dan KADIN.

Tanggal 30 Januari 2020, Komisi VI DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Mendag) dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan untuk mengkaji secara detil dan komprehensif terkait rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-negara EFTA;
2. Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-negara EFTA untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi perjanjian tersebut dengan melakukan kordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait

Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2020 Presiden RI telah mengirimkan Surat No. R-36/Pres/08/2020 kepada DPR RI perihal RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA) dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Perdagangan untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Tanggal 24 September 2020 Surat Presiden tersebut selanjutnya dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi dan berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI No. PW/11558/DPR RI/IX/2020 tanggal 24 September 2020 menugaskan Komisi VI DPR RI bersama-sama dengan pemerintah untuk membahas RUU tentang *Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia*

and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Indonesia dengan negara-negara EFTA).

Tanggal 22 Maret 2021, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Raker Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah untuk membahas RUU tersebut. Setelah melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, akhirnya dalam Raker tersebut, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU tentang *Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA) untuk selanjutnya dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Indonesia dengan negara-negara EFTA telah diinisiasi sejak tahun 2005 dan pada tanggal 23 November 2018 telah selesai dilakukan proses perundingan. Banyak manfaat yang didapat dengan adanya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA ini, diantaranya:

- Perluasan akses pasar ke negara-negara EFTA dan peningkatan daya saing produk Indonesia;
- Peningkatan investasi pelaku usaha dari negara-negara EFTA ke Indonesia, khususnya di sektor teknologi tinggi;
- Peningkatan kapasitas di bidang standar, pendidikan dan pelatihan;
- Pemanfaatan EFTA sebagai pintu masuk produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa; dan
- Peningkatan kerja sama yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian.

Mengakhiri Laporan Komisi VI DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan terhormat yang telah mempercayakan Komisi VI DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Komisi VI DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU ini. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi VI DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Demikian Laporan Komisi VI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini terhadap RUU tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,
Om Shanti Shanti Shanti Om***

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD.

**ARIA BIMA
A-189**